



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI (KUMHAM)
SERTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM RANGKA
MEMBAHAS KEMBALI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2023**

TANGGAL 23 NOVEMBER 2022

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 23 November 2022
W a k t u	: Pukul 10.39 WIB s/d 12.41 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	: Membahas kembali Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 1. Anggota: Fisik 29 Orang, Virtual 32 Orang, dan Ijin Orang dari 9 Fraksi dari 80 Orang Anggota. 2. Undangan: - Menteri Hukum dan HAM RI (KUMHAM) - PUU Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Kerja Badan Legislasi Menteri Hukum dan HAM RI (KUMHAM) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rangka Membahas kembali Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, Rapat dipimpin dan dibuka oleh Ketua Rapat Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH.
2. Rapat dibuka pada pukul 10.39 WIB, dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan

Menteri Hukum dan HAM yang diwakili oleh Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM serta Pimpinan PPUU DPD untuk menyampaikan pandangan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.

3. Rapat diskors Pkl.11.40 WIB dan dilanjutkan Pkl.12.13 WIB.

II. POKOK PEMBAHASAN.

A. Pengantar Ketua Rapat dalam rangka Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023:

1. Terkait dengan materi rapat hari ini dalam rangka Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan adanya usulan tambahan dari Komisi V DPR RI mengenai revisi UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme rapat

B. Pandangan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Mengajukan 2 (dua) RUU usulan tambahan dalam draf RUU Prioritas 2023 yang telah disepakati, yaitu:
 - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara;
 - RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
2. Terkait dengan draf Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, semoga apa yang menjadi aspirasi Pemerintah ini dapat diakomodir dan disepakati bersama, agar ditetapkan dalam Sidang Paripurna.

C. Pandangan PPUU DPD dalam rangka Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, sebagai berikut:

1. DPD juga berkeinginan untuk mengusulkan 1 RUU tambahan untuk Prolegnas Prioritas Tahun 2023 yaitu RUU tentang Pelayanan Publik. Beberapa alasan yang dapat kami sampaikan pengusulan ini adalah sebagai berikut:
 - Kehadiran UU Pelayanan Publik adalah bentuk kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) lahir dengan dorongan kuat pada era keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. Kelahirannya beriringan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 - Berdasarkan kegiatan konsultasi publik yang dilakukan DPD di 24 Provinsi pada masa sidang III tahun 2020-2021, DPD telah memetakan perubahan yang dapat dilakukan atas penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu :E-government; Kelompok rentan; Kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan *public-private-people-philanthropy partnerships* (P5); Perubahan paradigma dalam proses pelayanan publik; Penguatan kewenangan Ombudsman; Audit pelayanan dan

pengawasan internal dan eksternal; Perubahan mekanisme sengketa pelayanan publik; dan Penguatan partisipasi masyarakat.

- DPD juga telah melaksanakan Rapat Kerja dengan MENPAN dan Ombudsman dalam proses penyusunan RUU tentang Pelayanan Publik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setuju untuk merubah atau mengganti UU No. 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik. Beberapa alasan yang disampaikan MENPAN adalah bahwa UU tentang Pelayanan Publik telah berusia 13 tahun; kemudian ada dinamika Perkembangan TIK dan digitalisasi pelayanan; selanjutnya ada keinginan untuk penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan publik; kemudian terdapat persepsi masyarakat atas pelayanan publik yang meningkat; dan terdapat perkembangan politik dan administrasi masyarakat.

D. Pandangan Mini Fraksi-fraksi dalam rangka Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pandangan Mini Fraksi PPP

- RUU tentang DLLAJ
- Menyetujui Usulan Pemerintah Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.

2. Pandangan Mini Fraksi PDIP

- Fraksi PDIP menyetujui Usulan Pemerintah dan Usulan Komisi V

3. Pandangan Mini Fraksi Gerindra

- Fraksi Gerindra Menyetujui Usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 terkait RUU tentang IKN serta RUU tentang barang dan jasa, namun untuk RUU tentang DLLAJ Fraksi Gerindra menolak dikarenakan sebelumnya tidak dimasukkan kedalam Prolegnas 2023.

4. Pandangan Mini Fraksi Golkar

- Fraksi Golkar menyetujui Usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di DPR RI.

5. Pandangan Mini Fraksi NASDEM

- Fraksi Nasdem mendukung Usulan Komisi V DPR RI mengenai UU tentang LLAJ untuk tetap didalam Prolegnas namun untuk usulan Pemerintah Fraksi Partai NASDEM belum bisa memberikan pandangan .

6. Pandangan Mini Fraksi PKB

- Fraksi PKB menyetujui untuk IKN serta Barang dan Jasa untuk dimasukkan kedalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.

7. Pandangan Mini Fraksi PKS

- Fraksi PKS berpandangan RUU revisi UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ patut dipertimbangkan dan masuk kedalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.
 - Fraksi PKS menolak RUU tentang IKN.
 - Fraksi PKS Menyetujui RUU tentang Barang dan Jasa.
8. Pandangan Mini Fraksi PAN
- Fraksi PAN menyetujui RUU tentang IKN serta RUU tentang Barang dan Jasa dimasukan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan menolak revisiRUU LLAJ untuk dimasukan kedalam Prolegnas 2023.
9. Pandangan Mini Fraksi Demokrat
- Fraksi Demokrat menyetujui revisi UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ untuk dimasukan kedalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan menolak RUU tentang IKN serta RUU tentang Barang dan Jasa dimasukan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.

E. Pimpinan Rapat

1. Setelah Fraksi-fraksi memberikan pandangan dapat disimpulkan sebagai berikut:
- A. Fraksi yang menolak revisi UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ sebagai berikut:
 - Fraksi PAN;
 - Fraksi PKB;
 - Fraksi Gerindra;
 - PPP.
 - B. Fraksi yang menerima revisi UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ sebagai berikut;
 - Fraksi PDIP;
 - Fraksi GOLKAR;
 - Fraksi NASDEM;
 - Fraksi Demokrat;
 - Fraksi PKS.
 - C. Fraksi yang menerima RUU baru usulan Pemerintah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 sebagai berikut:
 - Fraksi PDIP;
 - Fraksi Golkar;
 - Fraksi Gerindra;
 - Fraksi PKB;
 - Fraksi PAN;
 - Fraksi PPP.
 - D. Fraksi yang menolak RUU baru usulan Pemerinta Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 sebagai berikut:
 - PKS;
 - Demokrat.

E. Untuk Fraksi NASDEM menyatakan Sikap abstain terhadap usulan Pemerintah mengenai Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.

2. RUU tentang Pelayanan publik yang merupakan usulan DPD untuk menukar RUU tentang Kepulauan akan di akomodir setelah ada komunikasi antara Pimpinan DPD RI dan Pimpinan DPR RI.

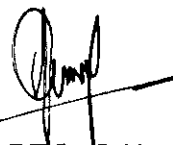
III. KESIMPULAN.

Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka Penyusunan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024, Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2022, dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, menyetujui untuk menyepakati:

1. Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2022 sebanyak 32 (tiga puluh dua) RUU;
2. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 sebanyak 41 (empat puluh satu) RUU; dan
3. Prolegnas RUU Perubahan Keempat RUU Tahun 2020-2024 sebanyak 259 (dua ratus lima puluh sembilan) RUU.

Rapat ditutup pukul 12.41 WIB.

Jakarta, 23 November 2022
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS



WIDIARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001